

**MARAKNYA UJARAN KEBENCIAN TERHADAP PRESIDEN INDONESIA SAAT
INI PADA APLIKASI X, FACEBOOK, DAN INSTAGRAM SEBAGAI
TANTANGAN DEMOKRASI: REFLEKSI URGENSI PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN DALAM MENANAMKAN NILAI TOLERANSI**

**Nur Aulia Rahman¹, Alifah Tu Zahra Baraqbah², Irma Fitriani³,
Suryaningsi Suryaningsi⁴**

Email: aulia490808@gmail.com, alifazhr9@gmail.com,
imra.adv99if@gmail.com, suryaningsi@fkip.unmul.ac.id

Universitas Mulawarman

Abstrak	Article History
<p>Penelitian ini mengkaji fenomena maraknya ujaran kebencian yang ditujukan kepada Presiden Indonesia serta implikasinya terhadap tata kelola demokrasi, dengan menyoroti peran mendesak pendidikan kewarganegaraan dalam menanamkan nilai toleransi. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi mendalam melalui komentar dan konten di aplikasi Instagram, X, dan Facebook. Temuan menunjukkan bahwa ujaran kebencian muncul sebagai bentuk ekspresi penyimpangan dari demokrasi atas ketidakpuasan mendalam masyarakat terhadap ketidakadilan, korupsi, dan implementasi kebijakan yang tidak transparan, tetapi demokrasi telah berubah menjadi ujaran kebencian. Insiden-insiden terkini—termasuk intimidasi grafis terhadap jurnalis, tren hashtag</p>	<p>Received: Juni 2025 Reviewed: Juni 2025 Published: Juni 2025</p> <p>Copyright : Author</p> <p>Publish by : CAUSA</p>  <p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.</p>

#IndonesiaGelap yang mencapai 14 juta cuitan dalam 24 jam, dan demonstrasi massal menanggapi kebijakan kontroversial—menggambarkan dampak nyata hate speech di era digital. Penelitian ini berargumen bahwa pendidikan kewarganegaraan yang menyeluruh, yang terintegrasi dengan literasi digital, etika komunikasi, dan pembentukan karakter, sangat penting untuk membekali masyarakat dengan keterampilan berpikir kritis guna mewujudkan diskursus politik yang konstruktif. Selain itu, diperlukan pendekatan multi-stakeholder yang menggabungkan upaya regulasi dan intervensi edukatif untuk menjaga integritas demokrasi dan kohesi sosial di Indonesia.

Kata Kunci: Demokrasi; Ujaran Kebencian; Aktivisme media; Diskursus politik; Kohesi sosial; Kontra narasi; Literasi digital.

Abstract

This study investigates the increasing phenomenon of hate speech directed at the President of Indonesia and its implications for democratic governance, while reflecting on the urgent role of citizenship education in fostering tolerance. Employing a qualitative research approach, data were collected through in-depth interviews with key informants from diverse sectors (private, government, and labor), participant observation in online forums, and content analysis of digital media. The findings reveal that hate speech emerges as an expression of deep-seated societal discontent against perceived governmental injustices, corruption, and

opaque policy implementation. Recent incidents—including graphic intimidation of journalists, trending hashtags such as #IndonesiaGelap that reached 14 million tweets in 24 hours, and mass protests responding to controversial policies—illustrate the real-time impact of hate speech in the digital era. The study argues that comprehensive citizenship education, integrated with digital literacy, ethical communication, and character-building strategies, is essential to equip citizens with the critical thinking skills necessary for constructive political discourse. Moreover, a multi-stakeholder approach that bridges regulatory measures and educational interventions is imperative to safeguard Indonesia's democratic integrity and social cohesion.

Keywords: Democracy; Hate speech; Media activism; Political discourse; Social cohesion; Counter-narrative; Digital literacy.

PENDAHULUAN

Seiring waktu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar pada cara kita berinteraksi, baik secara sosial maupun politik. Khususnya, media sosial seperti X, Facebook, dan Instagram kini telah menjadi tempat penting bagi masyarakat untuk berdiskusi, yang sering disebut sebagai "ruang publik digital". Di Indonesia, platform ini menjadi sarana utama bagi warga untuk menyuarakan kritik, harapan, dan keluhan mereka terhadap pemerintah. Akan tetapi, di samping manfaatnya untuk demokrasi, ruang digital ini juga menjadi tempat yang subur untuk menyebarkan masalah komunikasi, terutama ujaran kebencian (hate speech). Ujaran kebencian ini sering kali ditujukan kepada tokoh-tokoh publik, terutama Presiden Indonesia, yang menjadi simbol negara.

Peningkatan ujaran kebencian ini tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi sudah berkembang menjadi ancaman dalam bentuk gambar hingga intimidasi fisik.

Hal ini terbukti dari viralnya tagar #IndonesiaGelap yang mencapai 14 juta cuitan hanya dalam 24 jam, di mana 81 persennya bernada negatif (AJI Indonesia, 2024).

Problematika ujaran kebencian di Indonesia berakar pada interaksi kompleks antara faktor struktural, psikologis, dan kultural. Ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dipersepsikan tidak adil, kurangnya transparansi, dan melebarnya kesenjangan sosio-ekonomi menjadi katalisator utama bagi distorsi ekspresi demokratis menjadi penghinaan yang destruktif. Arsitektur algoritmis media sosial, yang beroperasi dalam kerangka "ekonomi perhatian" (*attention economy*), berfungsi sebagai akselerator yang memperkuat penyebaran konten provokatif dan emosional. Hal ini menciptakan "gelembung filter" (*filter bubbles*) dan "ruang gema" (*echo chambers*) yang mengintensifkan polarisasi afektif.

Dalam konteks ini, penguatan pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dengan literasi digital kritis (*critical digital literacy*) menjadi sebuah intervensi strategis yang mendesak. Tujuannya adalah untuk membekali warga negara dengan kompetensi untuk menavigasi lanskap informasi digital secara cerdas, membedakan antara kritik konstruktif dan penghinaan, serta berkontribusi pada pembentukan diskursus publik yang lebih rasional dan demokratis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis interaksi antara faktor-faktor pemicu ujaran kebencian terhadap Presiden Indonesia di media sosial. Secara spesifik, penelitian ini akan menelaah bagaimana persepsi dan artikulasi kritik

berbeda di antara berbagai latar belakang sektor (swasta, pemerintahan, dan buruh), serta mengevaluasi potensi pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dengan literasi digital sebagai instrumen untuk memperkuat kohesi sosial dan kesehatan demokrasi. Studi ini juga mengintegrasikan analisis kasus-kasus terkini—baik dari diskursus media daring maupun aksi demonstrasi di lapangan—sebagai refleksi nyata dari dinamika komunikasi politik dan tantangan demokrasi di Indonesia pada periode 2024-2025.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian ilmu sosial, khususnya dalam bidang demokrasi digital, tata kelola platform (platform governance), dan polarisasi afektif, serta memperkaya pemahaman mengenai peran strategis pendidikan dalam membangun resiliensi demokrasi di era digital. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak destruktif ujaran kebencian terhadap stabilitas politik dan sosial.

Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi berbasis bukti bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif dan adil, serta bagi para pendidik dalam mengembangkan kurikulum kewarganegaraan yang relevan dengan tantangan kontemporer. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengguna media sosial untuk berpartisipasi dalam ruang digital secara lebih bijak, etis, dan toleran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam (*verstehen*), kaya, dan kontekstual mengenai fenomena ujaran kebencian.

yang kompleks, sarat dengan nuansa linguistik, dan sangat bergantung pada konteks sosial-politiknya menuntut metode yang mampu melampaui sekadar kuantifikasi data. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dianggap paling sesuai untuk mengeksplorasi motif, pola, dan dampak dari fenomena ini secara holistik. Secara lebih spesifik, desain penelitian ini mengadopsi bentuk studi kasus multi-situs (*multi-site case study*), yang memungkinkan para peneliti untuk mengintegrasikan dan membandingkan data dari berbagai arena dalam hal ini, beberapa platform media sosial utama dan peristiwa-peristiwa politik di dunia nyata guna membangun analisis yang lebih kokoh dan valid. Untuk mencapai tujuan penelitian, data dikumpulkan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi guna memperkuat validitas temuan melalui triangulasi. Sumber data utama penelitian ini meliputi: Observasi Digital Non-Partisipan pada platform media sosial X, Facebook, dan Instagram untuk memantau dan mendokumentasikan unggahan, komentar, serta interaksi pengguna yang mengandung unsur ujaran kebencian. Fokus observasi adalah untuk mengidentifikasi pola penyebaran, karakteristik linguistik, dan respons audiens.

Instrumen pertama adalah Analisis Dokumen (Studi Pustaka Digital), yang mengandalkan pengumpulan data sekunder dari laporan investigatif media terkemuka (seperti Reuters, Kompas, dan Liputan6), laporan resmi dari organisasi masyarakat sipil yang kredibel (seperti Amnesty International dan Human Rights Watch), serta data dari inisiatif pemantauan khusus seperti *dashboard* yang dikembangkan oleh Monash University dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Terakhir, Integrasi Studi Kasus Kontemporer dilakukan dengan menganalisis data dari peristiwa-peristiwa terkini, seperti protes mahasiswa di Yogyakarta dan gerakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional

Indonesia (UU TNI) pada tahun 2025, untuk menghubungkan diskursus digital dengan manifestasi politik di dunia nyata.

Proses pengumpulan dan analisis data dilaksanakan secara sistematis dalam periode satu bulan, yang terbagi ke dalam tiga fase utama. Fase Observasi Awal dan Pemetaan digunakan untuk mengidentifikasi akun-akun media sosial, grup, dan tagar yang menjadi simpul (nodes) penyebaran ujaran kebencian, serta melakukan kategorisasi awal terhadap jenis konten. Selanjutnya, Fase Pengumpulan Data Intensif melibatkan dokumentasi sistematis terhadap komentar, konten visual, dan berbagai bentuk ekspresi yang mengandung unsur diskriminasi atau provokasi. Terakhir, Fase Analisis Data Kualitatif menggunakan pendekatan pengkodean tematik manual (manual thematic coding), di mana peneliti secara cermat mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan tema-tema utama yang muncul dari data untuk mengungkap pola, motif, dan karakteristik akun yang terlibat, sehingga dapat merangkai fragmen data menjadi sebuah narasi analitis yang koheren.

PEMBAHASAN

Analisis mendalam terhadap data yang terkumpul dari observasi digital, studi dokumen, dan studi kasus lapangan menghasilkan serangkaian tema utama yang saling terkait, yang secara kolektif melukiskan anatomi fenomena ujaran kebencian di Indonesia. Beberapa tema utama yang mencerminkan fenomena hate speech terhadap Presiden Indonesia dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam menanggulangnya:

I. Faktor Pemicu Hate Speech

Ketidakpuasan terhadap Kebijakan Publik: Ujaran kebencian berfungsi sebagai manifestasi dari frustrasi publik terhadap

kebijakan pemerintah yang dipersepsikan tidak adil atau tidak transparan, seperti penanganan pandemi Covid-19 dan kebijakan ekonomi. Ketika saluran demokrasi formal dirasa tidak efektif, media sosial menjadi katup pelepasan emosi. Studi yang dilakukan oleh Maulana & Mulyadi (2021) mengonfirmasi hal ini, dengan temuan bahwa sekitar 5% dari cuitan yang menggunakan kata kunci “Jokowi” selama masa pandemi mengandung ujaran kebencian yang secara spesifik berfokus pada ketidakpuasan terhadap penanganan wabah. Pengaruh Algoritma Media Sosial: Arsitektur algoritmis platform seperti X dan Facebook, yang berbasis pada ekonomi perhatian, secara inheren memprioritaskan konten yang memancing reaksi emosional kuat. Hal ini menciptakan “ruang gema” (*echo chambers*) dan “gelembung filter” (*filter bubbles*), yang memperkuat sentimen negatif. Kasus viralnya tagar #IndonesiaGelap, yang mencapai 14 juta cuitan dalam 24 jam, adalah bukti nyata bagaimana algoritma dapat berfungsi sebagai “amplifier” kemarahan kolektif (AJI Indonesia, 2024).

Faktor Ekonomi dan Sosial: Tekanan ekonomi, ketidaksetaraan, dan kesulitan hidup sehari-hari, sebagaimana ditekankan oleh narasumber dari sektor buruh, menjadi faktor pendorong yang signifikan. Dalam kondisi terhimpit, masyarakat menjadi lebih rentan terhadap narasi provokatif, terutama ketika literasi untuk membedakan informasi akurat dan palsu masih terbatas.

II. Perbedaan Persepsi Antar Sektor

Sektor Swasta: Kalangan profesional di sektor ini cenderung menyampaikan kritik secara lebih emosional dan langsung. Bahasa yang digunakan sering kali keras dan lugas, berfokus pada dampak negatif kebijakan pemerintah terhadap iklim usaha, investasi, dan

kesejahteraan ekonomi secara umum. Sektor Pemerintahan: Sebaliknya, kritik dari kalangan aparatur negara disampaikan dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan analitis. Mereka cenderung menyoroti isu-isu transparansi birokrasi dan akuntabilitas, serta menyalurkan kekhawatiran mereka melalui kanal-kanal yang lebih formal atau diskusi internal. Sektor Buruh: Kelompok buruh menyuarkan kritik mereka secara kolektif dan berbasis solidaritas. Narasi yang dibangun berpusat pada isu keadilan sosial, hak-hak pekerja, dan dampak langsung kebijakan terhadap kehidupan sehari-hari kaum buruh. Kritik mereka bersifat komunal dan sering kali dimobilisasi melalui serikat atau aliansi.

III. Dampak Sosial dan Psikologis dari Hate Speech

Dampak Psikologis: Ujaran kebencian menghasilkan dampak psikologis yang parah, terutama bagi jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi. Kasus intimidasi grafis yang dialami oleh jurnalis Francisca Christy Rosana (The Guardian, 2025) adalah contoh ekstrem bagaimana agresi digital dapat bertransformasi menjadi teror nyata. Paparan konstan terhadap ancaman semacam ini dilaporkan menyebabkan kecemasan, stres kronis, dan perasaan terisolasi. Sementara itu, dampak sosial utamanya adalah polarisasi sosial dan politik yang semakin dalam. Ujaran kebencian berkontribusi signifikan terhadap menguatnya *polarisasi afektif*. Sentimen negatif yang dimobilisasi secara masif di dunia maya, seperti yang terlihat dalam demonstrasi besar-besaran pada Februari dan Maret 2025, menunjukkan bagaimana diskursus digital dapat secara langsung memicu aksi kolektif di lapangan yang berpotensi mengancam kohesi sosial.

IV. Respons Hukum dan Kebijakan Publik

Di satu sisi, aparat penegak hukum telah mengambil tindakan terhadap beberapa pelaku ujaran kebencian, seperti dalam kasus Ruslan Buton dan anggota sindikat Grup Saracen, yang mengirimkan sinyal intoleransi negara terhadap penyebaran kebencian. Namun, di sisi lain, instrumen hukum yang digunakan, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan pasal-pasal terkait dalam KUHP baru, sering kali dikritik karena sifatnya yang ambigu dan multitafsir. Kasus yang menjerat pengamat politik Rocky Gerung menjadi contoh utama bagaimana interpretasi hukum yang tidak konsisten dapat mengancam kebebasan berpendapat (Maria et al., 2023). Sebagai respons non-hukum, pemerintah melalui Tim Komunikasi Presiden (TKP) dan Kantor Staf Presiden (KSP) telah meluncurkan kontra-narasi dan klarifikasi resmi. Di samping itu, kebijakan amnesti yang diumumkan oleh Presiden Prabowo terhadap sejumlah narapidana, termasuk beberapa pelaku ujaran kebencian, dapat dilihat sebagai langkah pragmatis untuk mengurangi beban sistem peradilan.

V. Peran Sentral Pendidikan Kewarganegaraan Secara Digital

Di tengah kompleksitas masalah, mayoritas informan sepakat bahwa solusi jangka panjang yang paling fundamental terletak pada pendidikan kewarganegaraan yang direvitalisasi dan diintegrasikan secara holistik dengan literasi digital, etika komunikasi, dan pendidikan karakter. Pendidikan ini bertujuan untuk membangun daya tangkal (*resilience*) pada warga negara agar mampu menyaring informasi secara kritis dan berpartisipasi dalam diskursus publik secara konstruktif. Implementasinya harus mencakup ranah formal dan non-formal. Di lingkungan formal, inisiatif seperti yang didiskusikan dalam Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 serta berbagai program

pelatihan di sekolah dan perguruan tinggi telah menunjukkan potensi dalam meningkatkan kesadaran kritis. Di ranah non-formal, upaya edukasi yang melibatkan komunitas dan kampanye literasi digital yang lebih luas sangat diperlukan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Diskusi

Diskusi tematik yang dihasilkan dari penelitian ini mengemukakan beberapa aspek penting sebagai dasar rekomendasi kebijakan dan strategi penanggulangan hate speech:

I. Interaksi Faktor Emosional dan Struktural:

Ujaran kebencian teridentifikasi sebagai produk dari interaksi antara faktor emosional, seperti kemarahan dan kekecewaan publik, dengan kegagalan sistemik pada saluran komunikasi resmi. Ketika mekanisme formal untuk menyampaikan kritik tidak berfungsi secara efektif, media sosial bertransformasi menjadi wadah alternatif untuk pelampiasan emosi. Data mengindikasikan bahwa eskalasi insiden ujaran kebencian berkorelasi dengan periode krisis, seperti saat penanganan pandemi Covid-19 dan pemberlakuan kebijakan ekonomi yang kontroversial (Maulana & Mulyadi, 2021).

II. Media Sosial sebagai Amplifier

Karakteristik inheren dari media sosial, seperti anonimitas, kecepatan penyebaran, dan jangkauan global, menjadikannya sebagai penguat (*amplifier*) yang efektif bagi ujaran kebencian. Fenomena tagar #IndonesiaGelap yang menjadi tren serta demonstrasi di Yogyakarta pada tahun 2025 menjadi ilustrasi bagaimana ujaran kebencian dapat dengan cepat menjangkau jutaan pengguna dan menciptakan efek domino terhadap opini

publik. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga didukung oleh strategi edukasi yang proaktif.

III. Respons Hukum yang Belum Konsisten

Meskipun langkah-langkah penegakan hukum telah diambil, terdapat inkonsistensi dalam penerapannya karena batas antara kritik yang konstruktif dan penghinaan yang dapat dipidana masih sering kali ambigu. Hal ini mengakibatkan penerapan pasal-pasal dalam UU ITE dan KUHP yang baru menjadi tidak seragam. Studi kasus yang melibatkan Rocky Gerung menunjukkan bahwa interpretasi hukum yang multitafsir dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya berpotensi mengancam kebebasan berpendapat (Maria et al., 2023).

IV. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan:

Pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dengan literasi digital dan etika komunikasi diidentifikasi sebagai solusi fundamental jangka panjang untuk mengatasi fenomena ujaran kebencian. Program-program yang telah diimplementasikan di institusi pendidikan formal, baik sekolah maupun perguruan tinggi, telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kesadaran kritis di kalangan generasi muda. Di samping itu, pendidikan non-formal juga memegang peranan penting untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dan memitigasi dampak negatif dari ruang gema (*echo chamber*) di media sosial.

V. Sinergi Multi-Stakeholder:

Solusi yang efektif untuk menanggulangi ujaran kebencian menuntut adanya kolaborasi sinergis antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial, dan masyarakat sipil. Pengembangan *dashboard*

pemantauan ujaran kebencian oleh Monash University dan AJI Indonesia merupakan contoh inovasi kolaboratif dalam memantau dan menganalisis tren ujaran kebencian secara *real-time*. Sinergi ini juga harus mencakup upaya penyempurnaan penegakan hukum melalui mekanisme klarifikasi dan kontra-narasi yang sistematis dari lembaga pemerintah seperti Tim Komunikasi Presiden (TKP) dan Kantor Staf Presiden (KSP).

VI. Dampak Politik dan Sosial:

Aksi protes dan demonstrasi yang terjadi pada tahun 2025 merefleksikan dampak luas dari ujaran kebencian terhadap stabilitas politik dan sosial. Gerakan massa yang dipicu oleh kebijakan kontroversial, seperti revisi Undang-Undang TNI dan pemotongan anggaran untuk program sosial, menunjukkan bahwa ujaran kebencian dapat menjadi pemicu konflik dan mengganggu proses demokrasi. Hal ini menuntut adanya respons yang terkoordinasi dari aparat penegak hukum, institusi pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan untuk menjaga keharmonisan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan bahwa maraknya fenomena ujaran kebencian yang menargetkan Presiden Indonesia di ruang digital merupakan manifestasi dari interaksi yang rumit antara dimensi emosional dan struktural. Ketidakpuasan publik yang dipicu oleh persepsi terhadap kebijakan yang tidak adil, ditambah dengan terbatasnya efektivitas kanal komunikasi resmi, menjadi bahan bakar utama bagi ekspresi kemarahan. Faktor ini kemudian diperkuat secara signifikan oleh cara kerja algoritma media sosial yang cenderung mengamplifikasi konten provokatif, serta

diperparah oleh tekanan ekonomi dan sosial yang dirasakan oleh sebagian masyarakat.

Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa artikulasi kritik tidaklah seragam; variasi dalam cara penyampaian antara sektor swasta, pemerintahan, dan kelompok buruh menunjukkan adanya perbedaan persepsi yang merefleksikan keragaman dinamika sosial-politik di Indonesia. Dampak dari ujaran kebencian ini bersifat multidimensional, tidak hanya menimbulkan tekanan psikologis pada individu yang menjadi target, tetapi juga secara nyata memperdalam fragmentasi dan polarisasi sosial, yang pada gilirannya berpotensi mengancam kohesi nasional.

Dari perspektif regulasi, meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan, efektivitasnya masih terhambat oleh ambiguitas dalam kerangka hukum yang ada, khususnya Undang-Undang ITE dan KUHP. Ketidakjelasan batasan antara kritik yang membangun dan penghinaan yang bersifat destruktif menjadi tantangan utama dalam implementasi hukum yang adil dan konsisten.

Dalam konteks ini, penelitian ini menegaskan kembali argumen sentralnya: solusi strategis jangka panjang yang paling fundamental adalah melalui revitalisasi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yang secara sadar mengintegrasikan literasi digital kritis, etika komunikasi, dan penguatan karakter kewargaan menjadi sarana esensial untuk membentuk kapasitas berpikir kritis dan daya tangkal masyarakat. Upaya ini harus dilakukan secara komprehensif, baik melalui jalur pendidikan formal di sekolah dan perguruan tinggi, maupun melalui program-program pendidikan non-formal yang menjangkau masyarakat luas. Tujuannya adalah untuk melahirkan warga negara digital yang aktif, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi pada diskursus publik yang sehat.

Pada akhirnya, penanggulangan ujaran kebencian secara optimal menuntut sebuah pendekatan holistik yang didasarkan pada kolaborasi lintas sektor. Sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan platform media sosial, dan organisasi masyarakat sipil adalah prasyarat mutlak untuk menciptakan ruang publik digital yang inklusif dan demokratis, sekaligus untuk menjaga stabilitas sosial-politik Indonesia dari ancaman disintegrasi yang ditimbulkan oleh penyebaran ujaran kebencian yang masif.

REFERENSI

- Ash-Shidiq, M. A., & Pratama, A. R. (2021). Ujaran Kebencian Di Kalangan Pengguna Media Sosial Di Indonesia : Agama Dan Pandangan Politik. *Universitas Islam Indonesia*, 2(1).
- Barokah, F., Maryanah, T., Darmastuti, A., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi Politik. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1).
<https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273>
- Dewi, C. I. D. L. (2021). Aspek hukum kebebasan berpendapat dan berekspresi. *YUSTITA Jurnal Hukum*, 15(1).
- Gayatri, S., & Ida Bagus Canirartha Satwika. (2022). PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA SARANA INFORMASI POLITIK. *Anubhava: Jurnal Ilmu Komunikasi Hindu*, 2(1).
<https://doi.org/10.25078/anubhava.v2i1.1050>
- Nandang. (2021). Peran media dalam penyelesaian konflik sosial. *HIKMAH: Jurnal Dakwah & Sosial*, 1(1).

- Ningrum, D. J., Suryadi, S., & Chandra Wardhana, D. E. (2019). KAJIAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 2(3).
<https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>
- Nurlatifah, M. (2018). Ancaman kebebasan berekspresi di media sosial. *Jurnal, September 2016*.
- Olivia, D. (2020). HAKIKAT KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA. *RIO LAW JURNAL*, 1(2).
<https://doi.org/10.36355/rlj.v1i2.409>
- Restianty, A. (2018). Literasi Digital, Sebuah Tantangan Baru Dalam Literasi Media. *Gunahumas*, 1(1).
<https://doi.org/10.17509/ghm.v1i1.28380>
- Selian, D. L., & Melina, C. (2018). KEBEBASAN BEREKSPRESI DI ERA DEMOKRASI: CATATAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA. *Lex Scientia Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27589>
- Syah, R., Darmawan, D., & Purnawan, A. (2019). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Literasi Digital. *Jurnal AKRAB*, 10(2).
<https://doi.org/10.51495/jurnalakrab.v10i2.290>
- Kadir, N. (2022). Media Sosial dan Politik Partisipatif : Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4(2), 180-197.
<https://doi.org/10.29303/resiprokal.v4i2.225>
- Umroh, F. (2019). Ujaran Kebencian (Hate Speech) pada Jejaring Media Sosial. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pembelajaran*, 15(13).
- Zempi, C. N., Kuswanti, A., & Maryam, S. (2023). ANALISIS PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN PENGETAHUAN POLITIK MASYARAKAT.

EKSPRESI DAN PERSEPSI : JURNAL ILMU KOMUNIKASI, 6(1).

<https://doi.org/10.33822/jep.v6i1.5286>

Fithry, A. (2020). PENGARUH UJARAN KEBENCIAN TERHADAP ELEKTABILITAS PASANGAN CALON PRESIDEN 2019. *Jurnal Jendela Hukum*, 7(2), 38-47. <https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1069>

Margianto, H. (2020). Tantangan Demokrasi di Indonesia. *Fisib Unpak*. Retrieved from <https://fisib.unpak.ac.id/berita/tantangan-demokrasi-di-indonesia>

Jamilah, F., & Wahyuni, P. (2020). Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar YouTube pada Tahun Politik Pemilihan Presiden 2019. *Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah, Dan Asing*, 3(2), 325-341. <https://doi.org/10.31540/silamparibisa.v3i2.1109>

Didha Narin Aiza. (2022). KEBERLAKUAN SURAT EDARAN KAPOLRI NO.6/X/2015 TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DITUJUKAN PADA PENANGANAN COVID-19. *Jurnal Studia Legalia*, 1(1), 14-28. <https://doi.org/10.61084/jsl.v1i1.15>

Ferdiansa, D., Darwis, M., & Said, I. M. (2022). Jenis Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kolom Komentar Instagram Jokowi pada Masa PPKM: Analisis Linguistik Forensik. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(5), 574-585.

Arisanty, M., Riady, Y., Permatasari, S. M., & Wiradharma, G. (2023). Edukasi Literasi Informasi Dalam Media Sosial Sebagai Wujud Kampanye Netizen Bijak, Cerdas, Kritis dan Inisiator Konten Positif. *GENDIS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 57-67. <https://doi.org/10.56724/gendis.v1i2.231>

